BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab V, penulis memaparkan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian secara keseluruhan yang dilakukan dengan cara study literatur yang data-datanya diperoleh dari buku, jurnal, maupun artikel dalam internet. Kesimpulan yang dibuat oleh penulis merupakan penafsiran terhadap analisis hasil penelitian penulis mengenai Kondisi Pangan Nasional Pasca Krisis Moneter Dan Peranan Bulog (1998 – 2006). Sedangkan rekomendasi penulis adalah saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kajian masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk lebih mengembangkan penelitian selanjutnya.

5.1 SIMPULAN

Krisis moneter yang menyerang Asia ditahun 1997, merupakan krisis yang begitu besar pengaruhnya bagi negara-negara Asia. Krisis berawal dari nilai tukar Bath Thailand pada tahun 2 Juli 2007, seperti efek bola salju krisis moneter yang di alami Thailand menular ke negara-negara di Asia. Krisis ini akhirnya bukan saja menerjang Thailand namun menghantam perekonomian negara lainnya, termasuk Indonesia. Hampir seluruh negara Asia mengalami dampak dari Krisis moneter ini, bukan hanya dalam bidang perbankan yang memang identik dengan moneter, namun krisis ini berdampak pada perekonomian Asia yang menjadi tidak stabil.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mendapatkan dampak yang begitu besar karena krisis moneter ini. Kondisi Indonesia pada masa itu begitu carut-marut, ketidakstabilan terjadi diberbagai aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Rakyat kesulitan dalam ekonomi karena harga bahan pokok hingga kebutuhan lainnya meningkat tajam, belum lagi ditambah PHK yang terjadi karena banyak perusahaan yang gulung tikar. Kesulitan yang dihadapi rakyat

membuat rakyat menjadi antipati terhadap pemerintahan Soeharto kala itu.Sikap rakyat yang tidak percaya terhadap pemerintah menimbulkan masalah baru dalam kehidupan sosial di Indonesia. pada akhir rezim Orde Baru ini rakyat dibuat tidak percaya dengan kinerja pemerintah dan dibuat berontak dengan keadaan negara yang goncang. Harga bahan pokok yang melambung akibat nilai tukar rupiah yang melemah, menjadi hal utama yang dirasakan rakyat sebagai sebuah bencana.

Bencana yang menimpa Indonesia bukan saja tentang krisis Ekonomi, namun disisilain bencana sungguhan menimpa pula Indonesia. Kebakaran hutan, kekeringan yang berkepanjangan yang menyebabkan menurunnya produksi pangan dan belum lagi merajalelanya hama belalang menyerang bidang pertanian pada masa itu. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, bahkan bahan bakar minyak tak luput dari kenaikan harga dan banyak perusahaan yang ambruk diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat rakyat semakin terpuruk pada akhir pemerintahan Orde Baru

Seluruh rakyat Indonesia mengkonsumsi beras, beras menjadi prioritas utama rakyat Indoensia sebagai bahan makanannya. Dalam memenuhi kebutuhan pokok atau pangan rakyat mengalami kesulitan karena pangan yang tidak tersedia dipasar, kelangkaan pangan terutama beras di sebabkan oleh Bencana yang menimpa Indonesia bukan saja tentang krisis Ekonomi, namun disisilain bencana sungguhan menimpa pula Indonesia. Kebakaran hutan, kekeringan yang berkepanjangan yang menyebabkan menurunnya produksi pangan dan belum lagi merajalelanya hama belalang menyerang bidang pertanian pada masa itu. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

Pemerintah mau tak mau harus menanggulangi kondisi Indonesia yang seperti ini, beberapa kebijakan sempat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi krisis yang terjadi ini, namun tak kunjung berhasil. Pilihan terakhir yang pemerintah laukan adalah dengan meminta batuan pada IMF, lembaga keuangan Internasional yang sudah sering memberi masukan tentang ekonomi kepada Indonesia. Di akhir tahun 1997 akhirnya Indonesia resmi meminjam dana pada IMF dengan di barengi oleh sebuah perjanjian bernama LoI

(Letter of Intent) yang mau tak mau harus dipatuhi pemerintah. Perjanjian ini terlihat sebagai runtuhnya kedaulatan pemerintahan Indonesia, kerena setiap kebijakan pemerintah harus mendapat persetujuan IMF dan kebijakan yang IMF rekomendasikan untuk Indonesia harus dipatuhi.

IMF masih tetap mepengaruhin kebijakan Indonesia, meskipun Indonesia telah berganti kepemerintahan. Salah satu hal yang menjadi rekomendasi dalam LoI yang haru dipatuhi pemerintah ialah menghilangkan hak monopoli dari BULOG dengaan kata lain harga pangan seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, membuka impor dengan tarif masuk 0%. BULOG sebuah lembaga yang mengatur segala hal tentang pangan nasional dikebiri haknya, hanya sebatas dapat mengatur atau memonopoli komiditas beras saja. Hak-hak istimewa BULOG yang telah diberikan sejak masa Orde Baru menjadi ditiadakan salah satunya KLBI (Kredit Likudasi Bank Indonesia) yang selama in menjadi sumber dana BULOG untuk menjalankan tugasnya menyerap seluruh hasil produksi petani.

Di awal tahun 2003 merupakan babak baru bagi BULOG, awal tahun ini tepatnya di tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG secara resmi berubah menjadi Perum BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003 yang kemudian di revisi menjadi PP RI Nomor 61 Tahun 2003. Berubahnya status BULOG dari LPND menjadi Perum berarti bahwa BULOG disamping memiliki fungsi publik juga memiliki fungsi komersial yang bersifat laba berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Presiden SBY berhasil melunasi utang Indonesia pada IMF ditahun 2006, walaupun utang tersebut jatuh tempo pada tahun 2010. Meski Indonesia tidak lagi memiliki utang pada IMF namun keadaan BULOG tidak terjadi perubahan apapun ditahun 2006. Namun tahun 2006 merupaka tonggak awal pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi BULOG dalam hal mengelola beras dan kembali mengatur harga pangan beras. BULOG kembali menjadi perantara antara petani dengan pemerintah.

5.2 REKOMENDASI

Penelitian tidak hanya membahas tentang alih fungsi lembaga BULOG saja, namun uga membahas beberapa kebijakan pemerintah, kondisi pangan nasional dan beberapa aspek lain selain pangan yang mengalami perubahan karena adanya LoI dengan IMF. Sehingga penulis berharap ada pengembangan penelitian yang terfokus membahas mengenai beberapa aspek lain yang mengalami perubahan karena adanya LoI dengan lembaga internasional seperti IMF. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang dituang dalam skripsi ini, berikut beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

Pertama, rekomendasi untuk Lembaga UPI. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan, sebagai wahana menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi Indonesia setelah melakukan peminjaman dana kepada IMF, melihat kondisi pangan Indonesia dimasa krisis moneter di tahun 1997 juga kondisi ketahanan pangan diberbagai masa kepemimpinan yang berbeda dan alih fungsi Lembaga Badan Urusan Logistik. Untuk Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, nilai-nilai yang terkandung dalam skripsi ini terutama mengenai mekanisme pasar dan liberalisme perdagangan bisa dijadikan bahan pemebelajaran untuk membangun kesadaran dan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Untuk Jurusan Pendidikan Sejarah, tulisan ini dapat memperkaya penulisan dan sumber bacaan mengenai Sejarah Orde baru dan Reformasi.

Kedua, rekomendasi untuk sekolah sebagai salah satu referensi dalam materi pelajaran sejarah di SMA kelas XII Semeste II dengan KD, mengevaluasikehidupanpolitik danekonomibangsaIndonesiapada masaawal Reformasi. Siswa tidak hanya belajar mengenai sistem politik, ekonomi, sosial dan aspek lainnya saja, namun siswa dapat mengenal kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah diawal reformasi dan kondisi perekonomian Indonesia terutama kondisi pangan.

Ketiga, rekomendasi untuk pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Swasembada tentu saja dapat kembali di raih oleh negeri ini, dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri yang baik. Namun yang lebih terpenting

dari hanya sekedar swasembada pangan ialah ketahanan pangan nasional yang masih belum terciptanya kecukupan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pun seharusnya mengusahakan pengembalian kembali hak BULOG karena pangan di Indonesia masih harus di atur oleh sebuah badan yang berwenang. Untuk pihak terkait terutama BULOG dalam mengatur ketahanan pangan nasional diharapkan BULOG dapat melakukan secara transparan, jujur tanpa penyalah gunaan wewenang dan anggaran, dapat menyerap seluruh produksi pangan dalam negeri dan mengontrol harga dipasar agar tidak lagi terjadi harga yang fluktuatif.

Keempat, rekomendasi untuk peneliti selanjutnya sebagai salah satu rujukan apabila ada yang ingin menulis mengenai kondisi awal reformasi, perjanjian LoI Indonesia dengan IMF dari aspek lain selain pangan, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di masa reformasi, dan penelitian selanjutnya yang ingin kembali menuliskan tentang peran BULOG setelah Indonesia melunasi utang dengan IMF. Sebab pada tahun 2006 saat susilo Bambang Yudhoyono melunasi seluruh utang pada IMF, merupakan tonggak awal dikembalikannya hak-hak yang dulu dimiliki BULOG.